



## **Sektor Manufaktur Ekspansif dan Inflasi Terjaga, Pemulihan Akan Diupayakan Terus Kuat dan Stabil**

**Jakarta, 1 September 2022** – Sektor manufaktur Indonesia kembali melanjutkan ekspansi dan terus menguat. Hal ini tercermin dari peningkatan *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur Indonesia yang mencapai 51,7 pada Agustus 2022 (Juli: 51,3) dan menjadi level tertinggi selama empat bulan terakhir. “Pertumbuhan ini didorong baik oleh peningkatan permintaan baru maupun peningkatan output. Selain itu, tekanan inflasi yang terkendali juga memiliki andil dalam ekspansi sektor manufaktur. Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga momentum ini tetap stabil agar sektor manufaktur tetap mampu menopang pemulihan ekonomi yang terus berlanjut di tengah ketidakpastian global saat ini”, ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Tren penguatan PMI juga dialami beberapa negara ASEAN, seperti Thailand 53,7 (Juli: 52,4) dan Filipina 51,2 (Juli: 50,8). Sementara, Malaysia dan Jepang sedikit melambat masing-masing pada 50,3 (Juli: 50,6) dan 51,5 (Juli: 52,1), serta Korea Selatan masih berkontraksi pada 47,6 (Juli: 49,8).

Peningkatan output manufaktur dan permintaan baru sangat baik dengan laju pertumbuhan tercepat dalam enam bulan. “Laju pertumbuhan ini terjadi karena permintaan yang kuat dan pemulihan pasar secara keseluruhan. Ini menandakan bahwa pemulihan dari sisi konsumsi terus melanjutkan tren penguatan”, tambah Febrio. Indikasi penguatan permintaan lainnya adalah peningkatan stok persediaan pascaproduksi serta aktivitas pembelian oleh produsen yang tercatat masih meningkat selama tujuh bulan berturut – turut. Pencapaian baik lainnya di antaranya terjadi pada tingkat penyerapan tenaga kerja yang melanjutkan pertumbuhan serta harga input dan biaya output yang menurun. Secara keseluruhan, sentimen bisnis di sektor manufaktur Indonesia tetap bertahan positif di tengah harapan akan berlanjutnya pemulihan permintaan domestik.

Dari sisi inflasi, pada Agustus 2022 inflasi tercatat 4,69% (yoy), turun dibandingkan Juli 4,94% (yoy). Secara bulanan (*mtm*), bulan Agustus mencatatkan deflasi sebesar 0,21% yang merupakan deflasi terbesar sejak September 2019. Sementara itu, inflasi inti (*core inflation*) pada Agustus 2022 sebesar 3,04% (yoy) meningkat (Juli 2,86%). Kenaikan inflasi inti terjadi pada hampir seluruh kelompok barang dan jasa, seperti sandang, layanan perumahan, pendidikan, rekreasi, dan penyediaan makanan dan minuman/restoran. Kenaikan inflasi pendidikan terjadi seiring dengan masuknya tahun ajaran baru. “Meningkatnya inflasi inti ini menunjukkan pemulihan daya beli masyarakat yang semakin kuat”, lanjut Febrio.

Inflasi pangan bergejolak (*volatile food*) mengalami penurunan ke level 8,93% (yoy) (Juli 11,47%). Hal ini didorong oleh membaiknya pasokan produk holtikultura seiring membaiknya panen di daerah-daerah sentra produsen pangan. Harga minyak goreng juga mencatatkan penurunan seiring harga CPO yang melambat. “Untuk memitigasi risiko inflasi yang berasal dari bahan pangan, Pemerintah akan mendorong percepatan dan efektivitas pemanfaatan anggaran ketahanan pangan”, lanjut Febrio.

Inflasi harga diatur pemerintah (*administered price*) pada Agustus 2022 sedikit meningkat ke 6,84% (yoy) (Juli: 6,51%). Sementara itu, tarif angkutan udara mengalami penurunan seiring dengan penurunan harga avtur dan pembebasan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendaratan dan penyimpanan pesawat di bandara. “Anggaran subsidi dan kompensasi energi yang terus meningkat sejak 2020 telah melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi”, kata Febrio.

Ke depan, koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah diperlukan untuk mengatasi risiko inflasi ke depan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan adalah kerja sama perdagangan untuk menjaga keseimbangan suplai dan *demand* antar daerah serta percepatan penyaluran APBD. “Dari sisi suplai, Pemerintah akan terus memastikan faktor kelancaran pasokan dan distribusi terutama untuk energi dan pangan. Berbagai anggaran yang dapat berkontribusi untuk pengendalian inflasi di daerah adalah Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk ketahanan pangan serta pembangunan jalan, jembatan, dan lainnya yang diharapkan memperlancar pasokan dan distribusi barang. Dari sisi permintaan, Pemerintah juga akan kolaborasi dengan otoritas terkait”, tutup Febrio.

---

**Narahubung Media:**

Endang Larasati  
Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik  
Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan

☎ 021 3441484

✉ [ikp.bkf@kemenkeu.go.id](mailto:ikp.bkf@kemenkeu.go.id)